

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO MENYERAHKAN LHP LKPD TA 2019 KEPADA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Senin (8 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan penyerahan LHP LKPD TA 2019 Kabupaten Gorontalo dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menerapkan protokol kesehatan terkait *covid-19*: Setiap tamu undangan diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berdasarkan empat kriteria, yaitu: kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektifitas sistem pengendalian intern; maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 adalah **WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)** atau **UNQUALIFIED OPINION**”.

Namun demikian, meskipun telah memperoleh opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Permasalahan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu terkait Pengelolaan Kas dan Persediaan, Pengelolaan Aset Tetap, Aspek Kepatuhan Pendapatan, Aspek Kepatuhan Belanja Pegawai, Aspek Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa, Realisasi Belanja Barang dan Jasa, Aspek Kepatuhan Belanja Modal, dan Aspek Kepatuhan Belanja Bantuan Keuangan.

Hal tersebut dimuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern) dan **Buku III** (LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).